

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Jumat, 13 Januari 2023

PERKEMBANGAN PPD (2011-2022)

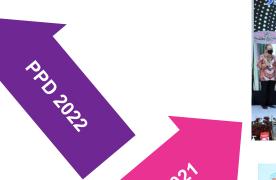




















Peningkatan kualitas PPD

Evaluasi dan motivasi Daerah

Perubahan nama dari Anugerah Pangripta Nusantara (APN) menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sejak 2018

Prestige

Diserahkan oleh Presiden RI pada tahun 2018 dan 2019, disaksikan secara virtual oleh Presiden pada 2020, 2021, dan 2022

Fairness dan Equal treatment

Sosialisasi dengan mengundang 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota sejak tahun 2019

Apresiasi

Capacity building kepada daerah terbaik. Dana Insentif Daerah (DID) diberikan untuk Daerah Terbaik alokasi mulai tahun anggaran 2018

Knowledge Sharing

Sharing praktik-praktik cerdas pembangunan daerah untuk alternatif solusi

Digital Evaluation System

Penguatan sistem penilaian berbasis web-based untuk user pusat dan user daerah

MANFAAT PPD





Pemerintah Pusat

☐ Mendapatkan data dan informasi detail mengenai kualitas perencanaan pembangunan Provinsi, Kabupaten, dan Kota				
☑Memahami kapasitas daerah dan SDM dalam perencanaan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan, serta keunggulan program dan kegiatan dalam pembangunan daerah.				
☐ Memperkuat koordinasi untuk pembangunan daerah				
Pemerintah Daerah				
☐ Penyampaian Rekomendasi terhadap Perbaikan Dokumen Perencanaan Provinsi, Kabupaten, dan Kota melalui Web Diagram				
☐ Mendorong Kepala Daerah dan Perangkatnya lebih memahami perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian, serta inovasi untuk penyelesaian masalah				
☐ Mendorong pembangunan daerah yang lebih terukur, akuntabel, dan inovatif serta berkelanjutan.				
☐ Berpotensi mendapatkan DID				
Non Pemerintah				
☐ Memahami bahwa dokumen perencanaan yang baik sangat penting dalam pembangunan daerah				
☐ Terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah				
☐ Mendorong non-government untuk peduli dengan pembangunan daerah, membantu pemerintah daerah, dan mementingkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah				
☐ Membantu menciptakan <i>awareness</i> bahwa peran masyarakat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah				

Manfaat PPD Buat Daerah: POLICY RECOMMENDATION





24 indikator untuk komponen perencanaan, pencapaian, dan inovasi

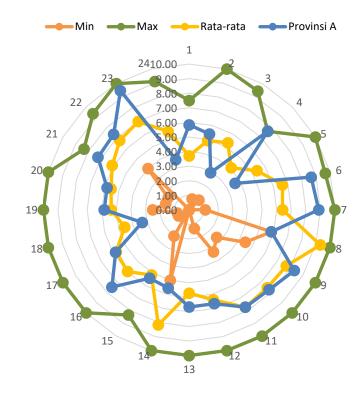
Desk Review terhadap RKPD dan Dokumen Inovasi

Keterangan:

- Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB per Kapita
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penganggur
- Kemiskinan
- 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Ketimpangan
- Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan
- 7. Transparansi dan Akuntabilitas
- Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2022 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD
- Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2022
- Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2020 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2022
- Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2022
- Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 dengan program prioritas daerah
- Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2022 dengan pagu anggaran

- Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan
- Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP 2022
- Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP 2022
- Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2022
- Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2022
- Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP 2022
- Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP
- Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2022 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)
- Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas
- 23. Kelengkapan dokumen inovasi daerah
- 24. Kedalaman inovasi daerah

Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD 2022 Provinsi A

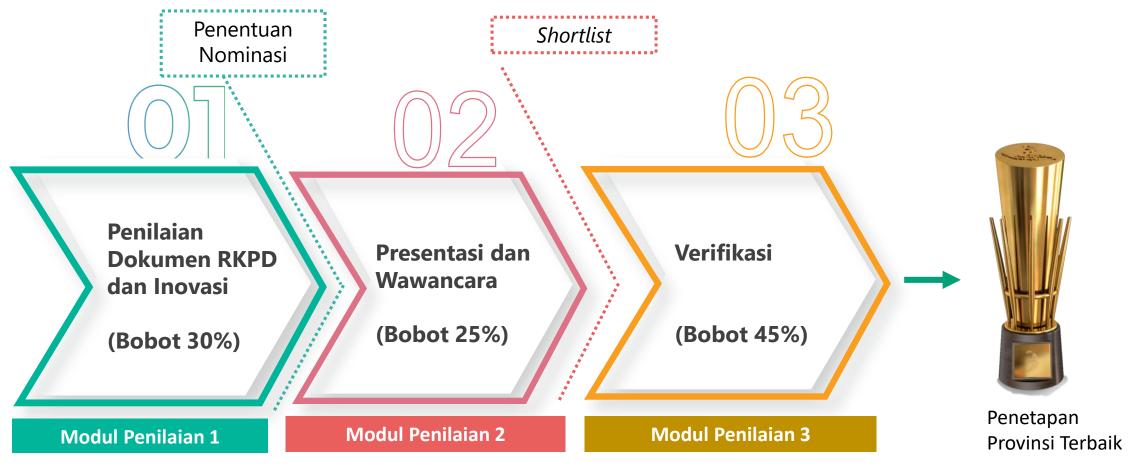




TAHAP PENILAIAN







Bobot penilaian telah melalui Analytic Hierarchy Process (AHP) yang melibatkan Pemda dan Tim Penilai tahun 2019.



TAHAP PENILAIAN KABUPATEN/KOTA **Penentuan Penentuan** Penilaian oleh Nominasi Kab/Kota **Tim Penilai Provinsi** Terbaik oleh Daerah **Provinsi** Penyampaian Pengumpulan Kab/Kota Sosialisasi Dokumen **Penilaian RKPD Terbaik** Verifikasi dan Kab/Kota dan Wawancara **Dokumen Inovasi** (Bobot 55%) (Bobot 45%) Penilaian oleh **Penentuan** Penentuan **Tim Penilai Pusat Shortlist** Nominasi **Penilaian** Presentasi dan **Dokumen RKPD** Verifikasi Wawancara dan Inovasi (Bobot 45%) (Bobot 25%) (Bobot 30%)



Berdasarkan agregasi antar tahapan secara **multiplikatif**

MODUL PENILAIAN PPD







Kementerian PPN/Bappenas Penghargaan Pembangunan Daerah 2023 RAHASIA MODUL 2 WAWANCARA Penilai Provinsi Dinilai Kabupaten /Kota Dinilai Digital evaluation system is available at

RAHASIA MODUL 3 **VERIFIKASI DAN** KUNJUNGAN LAPANGAN Nama Penilai Provinsi Dinilai Kabupaten /Kota Dinilai

22 indikator

22 indikator

24 indikator

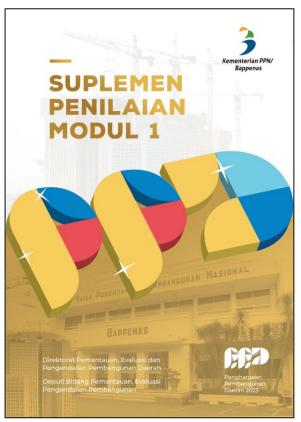


DOKUMEN PENDUKUNG PENILAIAN

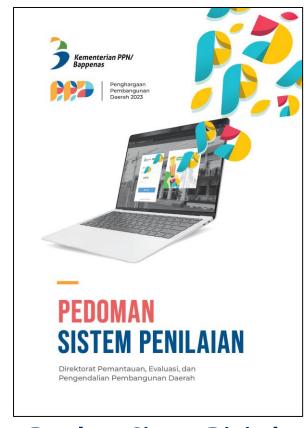












Pedoman Pelaksanaan

Suplemen Penilaian

Kuesioner IPD

Panduan Sistem Digital

MEKANISME PENILAIAN PUSAT







Modul 1

- Dinilai oleh TPT (1 daerah 3 TPT)
- Desk Review



Modul 2

- Dinilai oleh TPI dan TPU
- Konfirmasi dari instansi perencanaan pembangunan daerah (Bappeda)



Modul 3

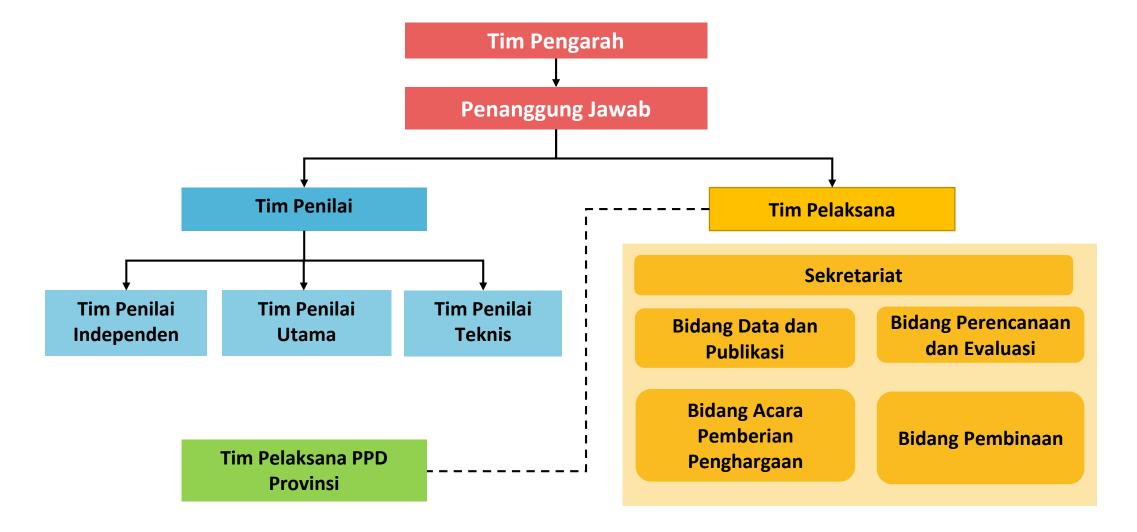
- Dinilai oleh TPI dan TPU
- Informasi dari stakeholder pembangunan diluar Bappeda
- Difasilitasi oleh Bappeda
- Perlu diperhatikan tatacara pelaksanaan verifikasi dan kunjungan lapangan



TIM PENYELENGGARA







Timeline Tahap Penilaian PPD 2023



Tahap Penilaian Provinsi

Tahap Penilaian Kabupaten/ Kota

Tahap 1: Desk Review RKPD, 34 provinsi, 34 kabupaten, dan 34 kota

- Sosialisasi, 12 Januari
- Dateline penyampaian dokumen, 19 Januari
- Penilaian Tahap 1, 20 Januari 8 Februari
- Finalisasi dan konsolidasi, 9 Februari
- Pleno Tahap 1, 10 Februari

- Sosialisasi, 13 Januari
- *Dateline* penyampaian dokumen, 13 Februari
- Penilaian Tahap 1, 14 Februari 1 Maret
- Finalisasi dan konsolidasi, 2 Maret
- Pleno Tahap 1, 3 Maret

Tahap 2: Presentation & in-depth interview, sekitar 45 provinsi, kabupaten, dan kota nominasi

- Penilaian Tahap 2, 16 -24 Februari
- Pleno Tahap 2, 27 Februari

- Penilaian Tahap 2, 8 17 Maret
- Pleno Tahap 2, 20 Maret

Tahap 3: Verification & site visit, 30 provinsi, kabupaten, dan kota (10 besar)

- Penilaian Tahap 3, 6 Maret 11 April
- Sharing hasil site visit, 12 April
- Pleno Provinsi Terbaik, 14 April

- Penilaian Tahap 3, 17 Maret 11 April
- Sharing hasil site visit, 12 April
- Pleno Kabupaten dan Kota Terbaik, 14 April



TIMELINE PPD 2023







Persiapan PPD 2023

- Konsep dan metodologi penilaian
- Simulasi metode penilaian
- Update modul dan kit penilaian
- Permohonan tim penilai
- Rapat Pengembangan sistem
- Laporan PPD ke Menteri
- Rapat Tim Pelaksana
- Draft SK Tim Penyelenggara
- Persiapan sosialisasi PPD
- Sosialisasi TPI



Penilaian PPD

- Penilaian Tahap II Provinsi
- Penilaian Tahap I Kabupaten dan Kota



Penyerahan Penghargaan

- Pleno penentuan daerah terbaik
- Persiapan penyerahan penghargaan
- Pembukaan Musrenbangnas

Desember Januari Februari Maret April

Sosialisasi PPD Penilaian PPD

- Sosialisasi TPU
- Sosialisasi TPT
- Sosialisasi Provinsi
- Sosialisasi Kabupaten dan Kota
- Penilaian Tahap I Provinsi
- Penilaian Kabupaten dan Kota oleh Provinsi

- Penilaian Tahap III Provinsi
- Penilaian Tahap II dan III
 Kabupaten dan Kota

RENCANA KERJA PPD 2023





No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			
Sosialisasi					
1	- Sosialisasi TPI	M3 Des			
	- Sosialisasi TPU	M1 Jan			
	- Sosialisasi TPT	M1 Jan			
	- Sosialisasi Provinsi	M2 Jan			
	- Sosialisasi Kabupaten dan Kota	M2 Jan			
2	Penilaian Provinsi				
	- Tahap I Penilaian Dokumen RKPD & Inovasi	M3 Jan – M2 Feb			
	- Rapat Finalisasi TPT	M2 Feb			
	- Rapat Pleno Penentuan Provinsi Nominasi	M2 Feb			
	- Tahap II Presentasi & Wawancara	M3 – M4 Feb			
	- Rapat Pleno Penentuan 10 Besar	M4 Feb			
	- Tahap III Verifikasi	M4 Mar – M2 Apr			
	Penilaian Kabupaten dan Kota				
	A. Penilaian di Provinsi				
	- Tahap I Penilaian RKPD & Dokumen Inovasi	M3 Jan – M2 Feb			
	- Tahap II Verifikasi dan Wawancara				
	B. Penilaian di Pusat				
3	- Tahap III Penilaian Dokumen	M3 – M4 Feb			
	- Rapat Finalisasi TPT	M1 Mar			
	- Rapat Pleno Penentuan Kabkota Nominasi	M1 Mar			
	- Tahap IV Presentasi & Wawancara	M2 – M3 Mar			
	- Rapat Pleno Penentuan 10 Besar Kabkota	M4 Mar			
	- Tahap V Verifikasi	M5 Mar – M2 Apr			
4	Konsolidasi Hasil Verifikasi	M2 Apr			
5	Rapat Pleno Penetapan Daerah Terbaik	M3 Apr			
6	Penyerahan Penghargaan: Pembukaan Musrenbangnas	Apr			

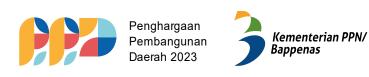
AGENDA SOSIALISASI KABUPATEN/KOTA







WAKTU (WIB)	KEGIATAN	PEMBICARA
08.30 - 08.35	Pengantar Acara oleh MC	
08.35 – 08.45	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Semua Peserta
08.45 – 08.55	Pembacaan Doa	Panitia
08.55 – 09.10	Pembukaan	Deputi PEPP
09.10 - 09.30	Penjelasan Umum PPD 2023	Direktur PEPPD
09.30 – 10.10	Penjelasan Teknis dan sistem PPD 2023	Koordinator Wil I
10.10 – 11.10	Diskusi	Dipandu Koordinator Wil I
11.10 – 11.15	Penutup	





Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Gedung Bappenas Lantai 9 Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07 Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan

